

Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Melalui Instrumen Pelayanan Informasi, Media Baru, dan Partisipasi Publik

Nurul Jannah Lailatul Fitria^{1*}, E. Kosmajadi¹, Anye Widuri¹

¹ Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

* E-mail: nuruljannahlailatulfitria@gmail.com

Received: 10 Desember 2025

Accepted: 20 Januari 2026

Published: 28 Februari 2026

Abstract

The limited understanding and skills of academics in implementing the measurement of the Public Information Disclosure Index (IKIP), particularly in the aspects of information services, the utilization of new media, and public participation, underline the need for participatory educational activities to strengthen capacity in supporting transparency and accountability in public information. This community engagement activity aimed to strengthen the capacity of academic partners in understanding and implementing the measurement of the IKIP through the instruments of information services, new media utilization, and public participation. The program was conducted in December 2025 at Universitas Majalengka and involved 25 participants consisting of undergraduate and graduate students in social and political sciences and public administration. The activity applied the Participatory Action Research (PAR) approach, which emphasized participatory and experiential learning through observation, needs assessment, educational seminars, methodological training, and practical simulations of index measurement. Data were collected through pre-test and post-test instruments, questionnaires, and interviews to evaluate changes in participants' knowledge and skills. The results showed a significant improvement in participants' capacity after the activity, with knowledge of public information disclosure increasing from 30% to 100%, understanding of the IKIP rising from 10% to 100%, comprehension of measurement instruments improving from 10% to 90%, and practical skills in conducting index measurement increasing from 5% to 90%. Additional improvements were observed in the dimensions of information services, new media, and public participation, indicating strengthened analytical and practical competencies. The participatory approach encouraged active involvement and experiential learning, enabling participants to apply the measurement framework directly in simulated assessments. The outcomes of the program were disseminated through the preparation of a scientific journal manuscript and articles that were granted Intellectual Property Rights (IPR), contributing to the strengthening of transparency literacy and supporting the broader implementation of the IKIP in academic and community environments.

Keywords: Public Information Disclosure Index, Public Information Governance, New Media, Public Participation.

Abstrak

Keterbatasan pemahaman dan keterampilan akademisi dalam mengimplementasikan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), khususnya pada aspek pelayanan informasi, pemanfaatan media baru, dan partisipasi publik, menjadi dasar perlunya kegiatan edukasi partisipatif guna memperkuat kapasitas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas mitra akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan pengukuran IKIP melalui instrumen pelayanan informasi, pemanfaatan media baru, dan partisipasi publik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember 2025 di Universitas Majalengka dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri dari mahasiswa strata satu dan magister pada bidang ilmu sosial dan politik serta administrasi publik. Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan proses pembelajaran partisipatif dan berbasis pengalaman melalui tahapan observasi, analisis kebutuhan, seminar edukasi, pelatihan metodologis, serta simulasi praktik pengukuran indeks. Data dikumpulkan melalui

instrumen pre-test dan post-test, kuesioner, serta wawancara untuk mengevaluasi perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas peserta yang signifikan setelah pelaksanaan program, di mana pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik meningkat dari 30% menjadi 100%, pemahaman IKIP meningkat dari 10% menjadi 100%, pemahaman terhadap instrumen pengukuran meningkat dari 10% menjadi 90%, serta keterampilan praktik pengukuran indeks meningkat dari 5% menjadi 90%. Peningkatan juga terlihat pada dimensi pelayanan informasi, media baru, dan partisipasi publik yang menunjukkan penguatan kemampuan analitis dan keterampilan praktis peserta. Pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga mereka mampu menerapkan kerangka pengukuran secara langsung melalui simulasi penilaian. Luaran kegiatan ini didiseminasikan melalui penyusunan manuskrip artikel ilmiah serta artikel yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga berkontribusi dalam memperkuat literasi keterbukaan informasi dan mendukung implementasi IKIP secara lebih luas di lingkungan akademik dan masyarakat.

Kata Kunci: Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Tata Kelola Informasi Publik, Media Baru, Partisipasi Publik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi modern membentuk pola masyarakat informasi dan pemerintah yang terbuka (Habibah & Irwansyah, 2021; Afandi, Afandi, & Erdayani, 2025). Kebijakan ini mengarahkan pemerintahan untuk melakukan transformasi menjadi pemerintahan yang terbuka (open government) dan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) (Nurmalinda & Firdaus, 2024; Abdussamad et al., 2024). Selain itu, keterbukaan informasi dan komunikasi publik perlu peran aktif masyarakat (Chairunnisa, Habibi, & Berthanila, 2023). Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik diwajibkan pada seluruh badan publik di pemerintahan pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa (Dewi, 2025; Ulaan et al., 2022; Kusnan, 2021). Model pemerintahan terbuka merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat seiring perkembangan masyarakat informasi (Sofiana, 2023; Wijaya et al., 2025). Konsep pengungkapan informasi publik (KIP) di Indonesia berorientasi pada paradigma pemerintahan terbuka dengan adaptasi digitalisasi untuk meningkatkan dan memastikan partisipasi publik (Oktaviane & Helmi, 2023; Mannayong et al., 2024).

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP) perlu tata kelola akses dan aset informasi publik yang terukur (Komdigi, 2025). Pengukuran KIP tidak hanya mengukur kuantitas penyebaran informasi, namun juga mengukur kualitas KIP dan menilai dampak pelaksanaan KIP (Sufa et al., 2024). Hal ini tertuang pada Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 02/KEP/KIP/IV/2024. Kebijakan ini memberikan arahan dan petunjuk dalam penerapan indeks keterbukaan informasi publik. Sebelumnya terdapat pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik, penilaian keterbukaan informasi publik hanya diterapkan dengan teknik monitoring dan evaluasi (Nawawi, Hilman, & Sonjaya, 2024). Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tidak sama dengan program Monitoring dan Evaluasi (Monev). Program monev mengorientasikan nilai kepatuhan badan publik dalam penyelenggaraan KIP dalam jangka waktu satu tahun melalui evaluasi KIP dan umpan balik pada temuan masalah. Program pengukuran IKIP mengorientasikan pada lingkup yang lebih luas melalui penjabaran komprehensif dalam keterbukaan informasi serta analisis kesenjangan setiap wilayah.

Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini perlu diketahui oleh seluruh aparatur pada lembaga publik dan masyarakat umum. Pengukuran IKIP ini perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Terdapat bentuk pemberdayaan dengan konsep pelatihan yang efektif dalam menerapkan komunikasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kegiatan pemberdayaan memberikan manfaat kepada peserta guna mengetahui, memahami dan menerapkan teknik komunikasi dengan baik dan mendukung nilai kualitas keterbukaan informasi publik (Hermawan & Nilamsari, 2023). Kegiatan ini memberikan manfaat untuk perangkat desa menerima pengetahuan terkait kebijakan regulasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik (Widyaningrum et al., 2025). Pemberdayaan selanjutnya memberikan manfaat yaitu peningkatan pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi publik guna mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik (Pratama & Ari, 2021).

Pada paparan di atas belum menunjukkan kegiatan pemberdayaan terkait pengukuran indeks keterbukaan informasi publik yang lebih spesifik. Namun belum ada pemberdayaan yang diorientasikan pada bentuk edukasi bagi akademisi dalam memahami nilai keterbukaan informasi publik. Akademisi perlu memahami instrument yang tepat dalam mengukur indeks keterbukaan informasi publik. Seluruh instrument harus mewakili prinsip keterbukaan informasi publik yang adaptif teknologi dan melibatkan masyarakat. Terlebih dalam pengukuran IKIP perlu dilakukan penilaian atau pengukuran serta analisis berdasarkan bukti. Pengukuran KIP tidak hanya mengukur kuantitas penyebaran informasi, namun juga mengukur kualitas KIP.

Temuan masalah mitra adalah keterbukaan informasi memiliki sifat administratif dan belum cerminan kualitas layanan yang nyata. Terdapat kesenjangan literasi IKIP seperti minim keterlibatan masyarakat dan aparatur dalam tata kelola data digital serta ketidakpahaman akademisi atas instrumen pengukuran IKIP yang berbasis bukti. Pemberdayaan guna memberikan edukasi dan pendampingan pengukuran IKIP yang adaptif teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka (*open government*).

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini meliputi, pertama, untuk membentuk mitra pemberdayaan yang harus memahami aspek pelayanan informasi yang memuat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam memahami standar operasional layanan informasi sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Tujuan kedua, mitra pemberdayaan memahami aspek pemanfaatan media baru. Mitra pemberdayaan masih menghadapi kesenjangan literasi digital dan keterbatasan strategi komunikasi publik berbasis teknologi. Ketiga, mitra pemberdayaan memahami aspek partisipasi publik; permasalahan terletak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan keterbukaan informasi. Sehingga, dalam kegiatan pengabdian ini, pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya menjadi kegiatan evaluatif, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran kelembagaan dan penguatan tata kelola pemerintahan terbuka yang berkelanjutan. Kegiatan ini menyediakan kegiatan edukatif serta pendampingan berkelanjutan serta penyebaran informasi melalui artikel ilmiah yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan jurnal ilmiah.

B. METODE DAN PELAKSANAAN

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui *Participatory Action Research (PAR)*, yaitu suatu metode yang menempatkan mitra sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan publikasi (Effendy, Margaretha, & Probandari, 2022). Dalam pendekatan ini, mitra tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, serta implementasi solusi. Keterlibatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap pra-pengabdian, pelaksanaan, hingga pasca-pengabdian dan tindak lanjut kegiatan. Dengan demikian, manfaat kegiatan pengabdian dapat dirasakan secara langsung oleh mitra melalui praktik dan pengalaman nyata (Siswadi & Syaifuddin, 2024).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan (*planning*), tindakan (*action*), observasi (*observation*), dan refleksi (*reflection*). Pada tahap perencanaan, mitra dilibatkan dalam proses *brainstorming* dan identifikasi awal permasalahan. Kegiatan ini diawali dengan observasi dan wawancara pada awal Desember 2025 untuk menggali hambatan yang dihadapi mitra, khususnya terkait akses informasi sebagai peneliti dan mahasiswa. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan validasi instrumen pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Selanjutnya dilakukan pengolahan data awal, analisis, studi literatur, serta perancangan program kerja yang akan diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian.

Tahap tindakan merupakan inti dari kegiatan pengabdian, di mana mitra berperan sebagai peserta aktif dalam menerima materi, pendampingan, serta praktik langsung. Kegiatan ini meliputi seminar umum mengenai keterbukaan informasi publik, pengenalan konsep dan indikator IKIP, serta pendampingan teknis dalam pengukuran indeks tersebut. Dalam proses ini, mitra terlibat dalam simulasi penilaian mandiri menggunakan indikator IKIP terhadap instansi pemerintah daerah. Selain

itu, mitra juga dilatih dalam mengolah data mentah menjadi nilai indeks, sehingga memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara mandiri. Materi pengabdian juga disebarluaskan sebagai bagian dari upaya edukasi yang lebih luas.

Tahap observasi dilakukan secara simultan selama kegiatan berlangsung, baik oleh tim pengabdian maupun mitra. Mitra melakukan pengamatan kritis terhadap kesenjangan antara regulasi keterbukaan informasi publik dengan implementasinya di lapangan. Observasi ini mencakup analisis terhadap data, dokumen, serta praktik pelayanan informasi publik yang tersedia. Sementara itu, tim pengabdian juga melakukan pemantauan terhadap keterlibatan, pemahaman, dan perkembangan kemampuan mitra selama mengikuti kegiatan.

Tahap refleksi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan serta mengukur peningkatan pemahaman mitra. Refleksi dilakukan melalui pengisian kuesioner dan wawancara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil refleksi menunjukkan berbagai temuan, termasuk kendala teknis dalam penggunaan platform digital pemerintah daerah serta efektivitas instrumen IKIP yang digunakan. Berdasarkan hasil tersebut, mitra bersama tim pengabdian menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi publik di masa mendatang.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Majalengka dengan lokasi utama di Universitas Majalengka. Penetapan lokasi didasarkan pada pertimbangan efisiensi jarak, waktu, dan biaya, serta relevansi konteks daerah. Kabupaten Majalengka dipilih karena telah memperoleh predikat badan publik dengan kualifikasi "informatif", sehingga memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut melalui pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Keterlibatan institusi akademik menjadi penting dalam mendukung penguatan tata kelola informasi publik berbasis kajian ilmiah.

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah kalangan akademisi, khususnya mahasiswa program sarjana dan pascasarjana di bidang ilmu sosial, politik, dan administrasi publik. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada relevansi keilmuan mereka terhadap isu kebijakan publik, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi. Jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak dua puluh lima orang, yang secara aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian.

Luaran yang ditargetkan dalam kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman mitra terkait pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik, tersedianya instrumen pengukuran yang relevan dan aplikatif, serta kemampuan mitra dalam melakukan praktik pengukuran secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan dokumentasi dan publikasi berupa foto dan video edukasi yang disebarluaskan melalui media sosial, laporan kegiatan pengabdian, artikel ilmiah, serta luaran berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Publikasi ilmiah yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat kontribusi akademik dalam bidang keterbukaan informasi publik.

Indikator capaian kegiatan pengabdian diukur melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Secara umum, terjadi peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mitra terkait keterbukaan informasi publik dan pengukuran indeksnya. Mitra yang sebelumnya belum memahami konsep dan instrumen pengukuran, setelah kegiatan menjadi mampu memahami serta mempraktikkan pengukuran secara mandiri. Selain itu, partisipasi mitra dalam kegiatan monitoring dan evaluasi juga meningkat, serta dihasilkan luaran akademik berupa artikel ilmiah dan publikasi yang relevan dengan kegiatan pengabdian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 1 Desember 2025, tim pengabdian melaksanakan observasi lapangan dan wawancara kepada 25 mitra pengabdian. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta mengenai keterbukaan informasi publik, praktik pelayanan informasi, serta pemanfaatan media digital di lingkungan akademik. Wawancara mendalam diarahkan pada pemetaan kebutuhan pelatihan, persepsi terhadap urgensi pengukuran indeks, dan potensi peran mahasiswa sebagai agen literasi informasi publik. Tahap ini menghasilkan gambaran awal mengenai kesiapan mitra serta kebutuhan materi yang bersifat aplikatif dan kontekstual.



Gambar 1. Observasi dan Wawancara Persiapan Kegiatan

Pada 2 sampai 4 Desember 2025, tim menyusun dan mengolah data hasil observasi dan wawancara. Proses ini meliputi analisis kebutuhan (needs assessment), identifikasi kesenjangan pengetahuan, serta kajian literatur yang relevan dengan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi, media baru, dan partisipasi publik. Tahap analisis bertujuan untuk memastikan bahwa materi dan desain program kerja berbasis pada kondisi riil mitra, sekaligus memiliki landasan konseptual dan normatif yang kuat.

Pada 5 sampai 6 Desember 2025, tim merancang program kerja pengabdian berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Perancangan mencakup penyusunan modul edukasi, metode pelaksanaan (ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi instrumen pengukuran), serta indikator keberhasilan kegiatan. Dengan jumlah mitra sebanyak 25 orang, desain kegiatan disusun secara partisipatif agar memungkinkan interaksi yang intensif, pendalaman materi, serta praktik langsung penyusunan instrumen evaluasi.



Gambar 2. Penyusunan Kegiatan Edukasi

Secara keseluruhan, tahapan pra-pengabdian ini memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Majalengka tidak bersifat umum, melainkan berbasis kebutuhan spesifik

mitra, terukur secara akademik, dan terarah pada penguatan kapasitas mahasiswa dalam memahami serta mengimplementasikan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Pada 9 Desember 2025, dilaksanakan seminar umum keterbukaan informasi publik yang bertujuan memberikan penguatan konseptual mengenai prinsip, dasar hukum, dan urgensi transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Materi seminar mengulas implementasi keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk hak dan kewajiban badan publik serta masyarakat. Diskusi interaktif menunjukkan tingginya antusiasme peserta, terutama dalam membahas relevansi keterbukaan informasi dengan isu kebijakan publik dan pelayanan publik di tingkat kabupaten.



Gambar 3. Paparan Materi Keterbukaan Informasi Publik.

Pada 13 Desember 2025, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pengenalan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahap ini, peserta diperkenalkan pada konsep, indikator, serta metodologi pengukuran IKIP, termasuk dimensi pelayanan informasi, pemanfaatan media baru, dan partisipasi publik. Pemateri menjelaskan bahwa pengukuran indeks tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas akses, responsivitas layanan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Peserta mulai memahami pentingnya pendekatan berbasis data dan indikator terukur dalam menilai tingkat keterbukaan suatu badan publik.



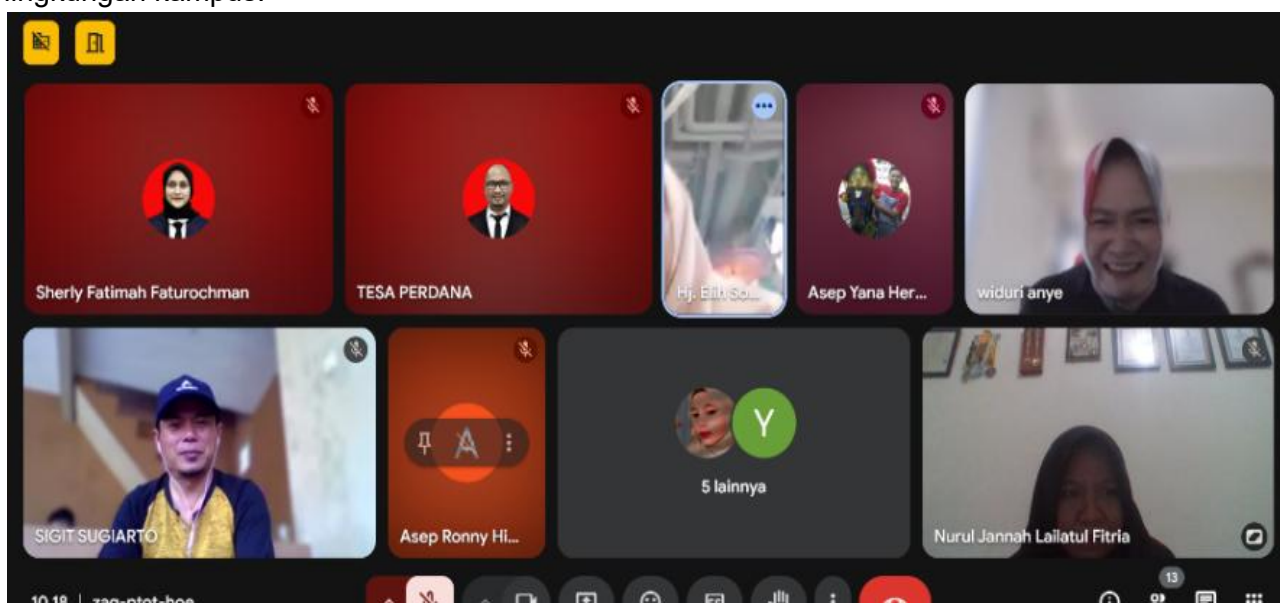
Gambar 4. Paparan Teknik Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Pada 20 Desember 2025, dilaksanakan praktik langsung pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan simulasi penilaian berdasarkan instrumen yang telah disusun. Kegiatan ini mencakup identifikasi indikator, penyusunan lembar evaluasi, serta analisis hasil penilaian secara sederhana. Praktik ini menjadi tahap paling aplikatif karena peserta secara langsung mengalami proses asesmen, diskusi perbedaan persepsi penilaian, dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Hasil praktik menunjukkan peningkatan kemampuan analitis peserta dalam menilai aspek transparansi dan kualitas pelayanan informasi.



Gambar 5. Praktik Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Tahap akhir dilaksanakan pada 29 Desember 2025 melalui penyebaran materi pengabdian. Materi dalam bentuk modul digital dan ringkasan instrumen pengukuran didistribusikan kepada seluruh mitra sebagai bahan rujukan lanjutan. Penyebaran materi ini bertujuan memastikan keberlanjutan dampak kegiatan, sehingga peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan akademik maupun penelitian selanjutnya. Selain itu, dokumentasi dan materi pengabdian diharapkan menjadi referensi bagi penguatan literasi keterbukaan informasi di lingkungan kampus.



Gambar 6. Penyebaran Materi Secara Daring.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengabdian ini menunjukkan pendekatan bertahap yang sistematis: dimulai dari penguatan konseptual, pemahaman metodologis, praktik aplikatif, hingga diseminasi materi. Pola ini efektif dalam membangun kapasitas akademisi sebagai mitra strategis dalam mendukung pengukuran dan penguatan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya sistematis dalam memperkuat kapasitas mitra, khususnya akademisi, dalam memahami dan mengimplementasikan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) secara komprehensif dan berbasis praktik. Fokus edukasi diarahkan pada tiga instrumen utama, yaitu pelayanan informasi, pemanfaatan media baru, dan partisipasi publik. Ketiga instrumen tersebut merupakan dimensi strategis dalam menilai keterbukaan informasi publik secara substantif, tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada kualitas layanan serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan informasi publik.

Pada aspek pelayanan informasi, materi mengacu pada prinsip keterbukaan informasi publik yang meliputi akses terbuka (*maximum access limited exemption*), kemudahan akses, penyediaan informasi secara proaktif, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penerapan sanksi bagi badan publik yang tidak patuh (Febrianingsih, 2012). Pada aspek media baru, edukasi menekankan karakteristik media digital seperti digitalisasi, interaktivitas, hiperteks, jaringan, virtualitas, dan simulasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas (Yunus & Mahpuddin, 2020). Sementara itu, pada aspek partisipasi publik, pendekatan yang digunakan mencakup keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan, serta evaluasi (Safitri, Myrna, & Ismanto, 2022). Integrasi ketiga dimensi ini membentuk kerangka evaluasi IKIP yang komprehensif dan kontekstual.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Pengetahuan dan Keterampilan Mitra.

Parameter	Pra (%)	Pasca (%)	Peningkatan (%)
Pengetahuan keterbukaan informasi publik	30	100	70
Pengetahuan IKIP	10	100	90
Pemahaman instrumen IKIP	10	90	80
Praktik pengukuran IKIP	5	90	85

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh parameter. Pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik meningkat sebesar 70%, sedangkan pemahaman mengenai IKIP meningkat sebesar 90%. Selain itu, pemahaman terhadap instrumen pengukuran meningkat sebesar 80%, dan kemampuan praktik meningkat sebesar 85%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode edukasi yang mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi, dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta. Hal ini sejalan dengan teori *experiential learning* yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman langsung mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan secara lebih optimal.

Tabel 2. Rerata Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Berdasarkan Dimensi IKIP

Aspek	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan (%)
Pengetahuan			
Pelayanan informasi	40	100	60
Media baru	50	95	45
Partisipasi publik	40	100	60
Keterampilan			
Pelayanan informasi	10	100	90
Media baru	10	90	80
Partisipasi publik	10	95	85

Berdasarkan Tabel 2, peningkatan terbesar pada aspek keterampilan terjadi pada dimensi pelayanan informasi (90%), diikuti oleh partisipasi publik (85%) dan media baru (80%). Sementara itu, pada aspek pengetahuan, peningkatan tertinggi terjadi pada pelayanan informasi dan partisipasi publik (masing-masing 60%). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan praktik langsung

memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam mengimplementasikan pengukuran IKIP.

Secara substantif, peningkatan pada aspek pelayanan informasi menunjukkan bahwa peserta telah memahami pentingnya transparansi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan informasi digital berkontribusi terhadap efektivitas kinerja birokrasi (Achmad, Salam, & Sari, 2026). Pada aspek media baru, peningkatan kemampuan peserta mengindikasikan bahwa digitalisasi berperan penting dalam memperluas akses informasi publik, sebagaimana dikemukakan oleh Hermawan, Malawat, dan Normajatun (2025) bahwa media digital mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Sementara itu, pada aspek partisipasi publik, peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa peserta semakin memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses keterbukaan informasi (Putra, Widakdo, & Sasmita, 2022).

Efektivitas kegiatan ini juga dipengaruhi oleh penerapan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang dialogis, reflektif, dan berbasis pengalaman, sehingga peserta mampu mengonstruksi pengetahuan secara mandiri (Adyputri, Narsan, & Palennari, 2025; Hasyim, 2025). Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat relevansi antara materi yang diberikan dengan kondisi nyata yang dihadapi peserta di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan praktik pengukuran IKIP mampu meningkatkan kapasitas mitra secara signifikan, baik dari aspek kognitif maupun keterampilan praktis. Hal ini mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam peningkatan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya keterbukaan informasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dilaksanakan di Universitas Majalengka terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan mitra terkait prinsip keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator, mulai dari pengetahuan dasar tentang keterbukaan informasi publik, pemahaman konsep IKIP, hingga kemampuan dalam menggunakan instrumen serta melakukan praktik pengukuran indeks. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu memperkuat kapasitas mitra, khususnya dalam memahami pelayanan informasi, pemanfaatan media baru, dan partisipasi publik sebagai dimensi utama dalam pengukuran keterbukaan informasi.

Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari penerapan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang mendorong keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif, reflektif, dan aplikatif, sehingga mampu mengintegrasikan pemahaman konseptual dengan keterampilan praktis dalam pengukuran IKIP. Dengan demikian, mitra tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung dalam konteks nyata.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek teknis, seperti pengisian instrumen, ketersediaan dokumen pendukung, serta proses validasi data dalam pengukuran indeks yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dalam pengukuran keterbukaan informasi publik merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak dapat dicapai secara instan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya tindak lanjut yang berkesinambungan, antara lain melalui program pendampingan lanjutan, pengembangan modul edukasi yang lebih aplikatif, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga publik. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat memperluas literasi keterbukaan informasi publik serta mendorong

terbentuknya budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola informasi publik yang lebih terbuka, responsif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang memberikan informasi dan acuan dalam Kebijakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 25 Mahasiswa Universitas Majalengka selaku mitra dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Karinda, K., Nursin, E., & Sandewa, F. (2024). E-Government di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Dampaknya pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1-15. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.111>
- Achmad, F. Y. N., Salam, K. S., & Sari, P. M. (2026). Optimalisasi Kualitas Layanan Publik Digital Berbasis E-government Melalui Penguatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Di Kota Baubau. *Besiru: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 287-294. <https://doi.org/10.62335/besiru.v3i2.2392>
- Afandi, M., Afandi, S. A., & Erdayani, R. (2025). Open Government: Key Issues of the Open Government Partnership in the Basque Country, Spain. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 7(2), 173-186. <https://doi.org/10.21580/jpw.v7i2.27804>
- Adyputri, N. N., Narsan, Z., & Palennari, M. (2025). Konseptualisasi pengembangan model pembelajaran CELL (Constructive, Experiential, Lifelong Learning) dalam konteks era digital. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 326-346. Retrieved from <https://www.journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/9302>
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31-45. <https://doi.org/10.47828/jjanaasian.v11i2.158>
- Dewi, A. J. K. (2025). Paradoks Keterbukaan Informasi Publik Dalam Era Kabinet Merah Putih: Kebijakan dan Implikasinya Terhadap Demokrasi. *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*, 5(7), 1-16.
- Effendy, C., Margaretha, S. E. P. M., & Probandari, A. (2022). The Utility of Participatory Action Research in the Nursing Field: A Scoping Review. *Creative Nursing*, 28(1), 54-60. <https://doi.org/10.1891/CN-2021-0021>
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Hasyim, S. (2025). Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Subjek Didik: Pendekatan Humanistik dalam Penguatan Karakter Peserta Didik. *Journal of Education, Pedagogy and Teacher Training*, 2(2), 15-28. Retrieved from <https://ojs.barkahpublishing.com/index.php/jeptt/article/view/106>
- Habibah, A. F., & Irwansyah. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Informasi Bisnis*, 3(2), 350-363. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>
- Hermawan, A., Malawat, S. H., & Normajatun. (2025). Pemanfaatan Media Sosial Bagi Aparatur Pemerintah Desa Handil Maluka Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Dalam Upaya Meningkatkan Keterbukaan Pelayanan. *Jamas*, 3(3), 1007-1013. <https://doi.org/10.62085/jms.v3i3.220>
- Hermawan, H., & Nilamsari, N. (2023). Pelatihan Strategi Yang Efektif Dalam Mengomunikasikan Program Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 3(2), 40-45. <https://doi.org/10.32509/dianmas.v3i2.3782>
- Komdigi. (2025). *Pengelolaan Akses dan Aset Informasi Publik Harus Terukur dan Transparan [Internet]*. Jakarta: Direktorat Jendral Komunikasi Publik Dan Media. Retrieved from <https://djcpm.komdigi.go.id/berita/artikel/251/pengelolaan-akses-dan-aset-informasi-publik-harus-terukur-dan-transparan>

- Kusnan, K. (2021). Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa: Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 87–102. Retrieved from <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2508>
- Mannayong, J., S. M. R., Herling, & Faisal, M. (2024). Digital Transformation and Community Participation: Realizing More Active Public Engagement. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 51–72. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>
- Nawawi, L., Hilman, & Sonjaya, T. (2024). Penerapan Keterbukaan Informasi Melalui Monitoring Dan Evaluasi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten. *Antasena: Governance and Innovation Journal*, 2(2), 186–196. <https://doi.org/10.61332/antasena.v2i2.241>
- Nurmalinda, M., & Firdaus, M. R. (2024). Open Government Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kantor Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 7(2), 1800–1815. <https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1118>
- Oktaviane, D. P., & Helmi, R. F. (2023). Peranan Teknologi Informasi Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JPAMS: Journal of Public Administration and Management Studies*, 1(1), 25–29. Retrieved from <https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS/article/view/16>
- Pratama, B. I., & Ari, D. P. S. (2021). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik. *Surya Abdimas*, 5(3), 312–321. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.1281>
- Putra, A. A., Widakdo, D. T., & Sasmita, R. F. (2022). Sosialisasi Sistem Informasi Desa Berbasis Web (Open Sid) Pada Desa Jati Indah Tanjung Bintang Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat: Abdimas Toddopuli*, 4(1), 21–28. Retrieved from https://www.academia.edu/99612374/Sosialisasi_Sistem_Informasi_Desa_Berbasis_Web_Open_Sid_Pada_Desa_Jati_Indah_Tanjung_Bintang_Lampung_Selatan
- Safitri, N., Myrna, R., & Ismanto, S. U. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 304–314. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41314>
- Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantangan Dan Peluang Dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.1174>
- Sofiana, A. (2023). Analisis Implementasi Open Government Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) Pada Fitur Jak-Respon Dalam Penyebarluasan Informasi Publik. *Journal of Social Contemplativa*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.10>
- Sufa, I. G., Mardiana, T., Martiana, A., Dewi, I. G. A. R. C., Mufti, O. K., Pernando, ... Ngarasati, S. A. (2024). *Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Ulaan, A. L., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/40341>
- Widyaningrum, T., Sihotang, B., Sekartaji, R. R. H. T., Firman, Nababan, R. E., Mailinda, N., ... Teturan. (2025). Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Desa Di Kecamatan Cigombong. *Berdikari*, 8(2), 96–103. <https://doi.org/10.52447/berdikari.v8i2.8722>
- Wijaya, K. A. A. S., Lukman, J. P., Dewi, S. A. N. S., & Riani, N. W. (2025). Penerapan Open Government Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Publik di Kota Denpasar. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3507>
- Yunus, Y., & Mahpuddin. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Membangun Hubungan Dengan Pendengar MS Radio. *Kinesik*, 7(3), 293–302. <https://doi.org/10.22487/ejk.v7i3.132>